

Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

Buku ini diawali dengan mengulas problem ketidakpercayaan (distrust) yang jamak terjadi di antara para pemangku kepentingan di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia. Uniknya, kecurigaan terjadi bukan saja karena ASN yang terlibat pengadaan dituding oleh aneka pihak bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, tetapi juga karena terdapat aneka oknum aparat penegak hukum (APH) yang diindikasikan memeras ASN atau memengaruhi proses penentuan pemenang tender secara ilegal. Buku ini menjelaskan adanya norma hukum yang keliru secara konseptual, namun terus dipertahankan di level praktik, sehingga peluang APH untuk abuse of power terus terjadi. Selain menyinggung dan memberikan solusi untuk hal di atas, buku ini utamanya juga menunjukkan ada aneka masalah pokok--baik di eksekutif maupun yudikatif--yang kerap terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, yaitu dokumen pengadaan di-setting untuk menguntungkan calon peserta tender tertentu; terdapat distrust pada mekanisme sanggah dan sanggah banding, penetapan pemenang tender yang dipandang kurang transparan, dan ketidakmampuan lembaga peradilan dalam menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Guna mengatasi masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik dan pendekatan perbandingan hukum (baik pada level konsep, regulasi, dan kajian putusan) dengan Negara Belanda dan Inggris. Buku ini ditutup dengan temuan dan rekomendasi konseptual dan praktikal untuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, semoga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kami himpun dalam bentuk buku ini dapat bermanfaat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 LAMPIRAN I -
Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa LAMPIRAN II - Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang LAMPIRAN III - Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi LAMPIRAN IV-A - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha LAMPIRAN IV- B - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan LAMPIRAN V - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya LAMPIRAN VI - Tata Cara Swakelola Dan Penjelasannya Buku persembahkan penerbit

MediaPressindoGroup

Penggunaan keuangan negara menuntut proses pelaksanaan yang tertib, disiplin, tepat, dan akuntabel maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Buku ini layak untuk menjadi pedoman dan referensi bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan negara

melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara swakelola. Sebuah langkah ikhtiar mewujudkan pengadaan yang kredibel demi kesejahteraan rakyat. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. , Walikota Sukabumi Membaca buku ini akan membuka wawasan kita untuk memahami pernak-pernik swakelola. Selama ini, masih banyak orang bahkan para pejabat pengambil keputusan yang beranggapan bahwa dengan swakelola maka “segalanya bisa dilakukan dengan swakelola pula”. Buku ini akan meluruskan anggapan salah tersebut, dengan pemberian contoh-contoh yang aplikatif dan penjelasan yang mengalir runtut, baik tinjauan dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun perpajakan. Achmad Karsono, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Trainer dan PKA PB/J, Anggota P3I Kurangnya rujukan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan swakelola merupakan kendala utama bagi para praktisi. Regulasi yang menjadi satu-satunya referensi harus kembali dijabarkan dalam bentuk buku agar lebih mudah dipahami. Buku ini menjadi salah satu rujukan yang dapat memberikan arah yang benar mengenai pelaksanaan swakelola. Buku ini tidak hanya sebatas menyalin kembali apa yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengurai lebih luas mengenai swakelola. Rahfan Mokoginta, PNS Pemda Kota Kotamobagu-Sulawesi Utara, Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa, Anggota P3I -VisiMedia- Tulisan ini menyajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi prinsip-prinsip tata kelola penggalian pendapatan universitas yang baik, implementasi prinsip-prinsip tata kelola penggalian pendapatan universitas yang baik dan permasalahan serta kendala dalam implementasi prinsip prinsip tersebut. prinsip-prinsip tata kelola penggalian pendapatan universitas yang baik tersebut kemudian dianalisis dan dibahas dengan menggunakan perspektif teori agensi. Buku ini merupakan pengembangan dari disertasi yang telah penulis selesaikan pada awal tahun 2013 sehingga nuansa hasil sebuah penelitian sangat kental terasa dalam isi buku ini.

SERI IKHTISAR HUKUM EKONOMI DAN BISNIS BUKU II: BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan

ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK

Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagaimana cara memenangkan?

Penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan sesuai harapan bilamana dilengkapi dengan seperangkat sumber daya, antara lain sumber daya keuangan. Sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihak pemerintah diberikan seperangkat hak dan kewajiban. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk menarik pajak, memungut restribusi dan memperoleh sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan ataupun penyediaan barang dan jasa publik. Pelayanan ataupun penyediaan jasa oleh pemerintah akan tercermin dari alokasi ataupun distribusi belanja pemerintah. Guna melaksanakan kegiatan ataupun program-program yang telah diamanatkan kepadanya pemerintah diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan meliputi serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Pemahaman yang benar atas landasan pemikiran baik dalam tataran akademik ataupun peraturan perundangan terhadap pengelolaan keuangan daerah diyakini akan dapat memperluas cakrawala yang pada gilirannya akan dapat digunakan untuk menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengimplemetasikan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Buku ini bermaksud memberikan referensi kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya manajemen keuangan. Buku ini ditulis dengan mendasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman penulis saat bertugas di lingkungan

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (saat ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah= DJKD) Kementerian Dalam Negeri; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); ataupun pada saat mengampu mata kuliah Governance; Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik pada berbagai perguruan tinggi. Selain itu, bahan-bahan tulisan diambil dari berbagai sumber, terutama dari berbagai tulisan selama penulis bertugas di Kementerian Dalam Negeri, di samping berbagai peraturan perundang-undangan. Buku Jilid 1 ini mencakup 7 bab, yakni Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan, Penganggaran Daerah, Manajemen Penganggaran Barang dan Jasa, Manajemen Aset (Barang Daerah) dan Manajemen Kas.

Samsul Ramli, S.Sos., Cert. SCM (ITC) adalah salah satu pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (P3I) yang peduli dengan kajian-kajian strategis pengadaan barang/jasa pemerintah atau private. Aktif berinteraksi di dunia maya termasuk mengelola Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan pada media jaringan sosial facebook dan menulis melalui blog <http://samsulramli.wordpress.com>. Penulis telah menerbitkan beberapa buku dengan tema pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Muhammad Ide Ambardi, S.T. adalah pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Desember 2005. Telah beberapa kali mengikuti pelatihan di bidang manajemen mutu dan pengadaan barang/jasa. Pada September 2013, penulis merupakan delegasi Indonesia yang ikut dalam Pelatihan Procurement Anti-Corruption Training (PACT) yang diadakan oleh International Anti-Corruption Academy (IACA) di Austria. -VisiMedia-

Buku ini mejabarkan secara detail lebih dari 40 kebijakan baru pengadaan barang/jasa yang terdiri dari pengaturan baru, perubahan istilah, perubahan definisi dan perubahan pengaturan dalam Perpres No. 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengenai pergeseran pemahaman aspek hukum pengadaan barang/jasa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, serta memberikan tips menghindari berbagai risiko hukum pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup Buku Manajemen Operasional ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan yang memadai tentang perkembangan manajemen operasional khususnya dalam industri. Hal ini penting karena sebagai seorang calon tenaga profesional tidak cukup hanya mengetahui sejumlah ilmu, melainkan juga dituntut untuk dapat memahami implementasi manajemen operasional dalam industri. Kehadiran buku ini juga sangat membantu kelancaran perkuliahan dan memudahkan pemahaman mahasiswa tentang implementasi manajemen operasional dalam industri sehingga nantinya dapat dijadikan modal dasar bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran optimal. Penulis berharap buku ini memberikan manfaat bagi para dosen, praktisi, dan mahasiswa guna pengembangan ilmu dan peningkatan SDM yang berkualitas.

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

DARI PULAU BURU KE CIPINANG

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum

Sentralisasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku koruptif dari oknum pejabat atau birokrat. Sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Buku ini ditujukan kepada para pelaku pengadaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (instansi pemerintah pusat maupun daerah), pelaku bisnis, para praktisi hukum (jaksa, hakim, polisi, advokat), dosen dan mahasiswa serta masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh seluk beluk birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pemahaman atas pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitasnya. PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah kewenangan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pengadaan barang/jasa terjadi kompetisi di antara para penyedia barang/jasa tersebut yang acapkali dilakukan tidak dengan cara fair; sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal, di negara yang menganut sistem politik demokrasi dituntut adanya persamaan dan asas keterbukaan. Monopoli terhadap proyek pengadaan barang/jasa tidak diperkenankan lagi. Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara terbuka, dapat dihindari adanya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

***Peraturan Pengadaan Barang & Jasa Penerbit Genesis Learning
Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah***

***Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kedua)
Bacaan wajib pengadaan barang/jasa penanganan keadaan darurat
[sumber elektronik]***

***Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tindak Pidana Korupsi***

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah

Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peran startegis dalam pembangunan nasional, terkhusus pada saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hadirnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Masyarakat Jasa Konstruksi. Pada bulan April 2020 dikeluarkan PP No.

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi sebagai Peraturan Pelaksana UU Jasa Konstruksi. Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga berdampak adanya beberapa perubahan pada keberlakuan UU Jasa Konstruksi. Pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, di keluarkan PP 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP 22 Tahun 2020. Berlakunya berbagai peraturan di bidang Jasa Konstruksi dan ketersediaan literatur buku-buku hukum mengenai Jasa Konstruksi masih terbatas di Indonesia, maka buku ini dihadirkan. Buku ini hadir dengan menarasikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan Jasa Konstruksi atau ingin mendalami Hukum Jasa Konstruksi baik Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, Pemerintah, Asosiasi Profesi, dan Kalangan Perguruan Tinggi baik mahasiswa maupun dosen maka buku ini layak untuk dibaca.

Buku ini membahas mengenai langkah-langkah dan strategi dalam proses pengadaan dan cara untuk mengoptimalkan setiap langkah untuk menghasilkan nilai yang lebih unggul terhadap produk yang dihasilkan. Lebih detail buku ini membahas tentang : Bab 1 Manajemen Pengadaan dan Supply Chain Management Bab 2 Kebijakan, Etika dan Profesional Manajemen Pengadaan Bab 3 Spesifikasi Perencanaan Pengadaan Bab 4 Model Strategi Pengadaan Bab 5 Tender dalam Manajemen Pengadaan Bab 6 Hak dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Kontrak Bab 7 Pengelolaan Pengadaan Bab 8 Monopoli dan Pasar Monopoli Bab 9 Pengertian Outsourcing Bab 10 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Isi buku ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, disusun dan disajikan secara lengkap, rinci, runtut, dan runut sehingga memudahkan para pembaca memahami tentang pengaturan dan prosedur serta tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selama ini belum ada buku yang memuat pengaturan, prosedur, dan tata cara pengadaan tanah secara lengkap dan terperinci. Buku ini terdiri atas tiga bagian, yaitu tentang Perkembangan Peraturan Perolehan Tanah (dari Pencabutan Hak Atas Tanah ke Pembebasan Tanah sampai Pengadaan Tanah); tentang Pengaturan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Manfaat yang ingin diperoleh dari buku ini, baik bagi kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Untuk instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum, buku ini sangat membantu memahami pengaturan, prosedur, dan tata cara memperoleh tanah melalui pengadaan tanah. Untuk masyarakat umum khususnya yang terkena proses pengadaan tanah, buku ini membantu pemahaman bagaimana pengadaan tanah itu dilakukan dan sekaligus memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Buku ini juga ditujukan untuk para mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bahan untuk mengikuti mata kuliah Hukum Agraria dan khususnya mata kuliah Hukum Pengadaan Tanah. Buku persembahkan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI
Konsep dan Praktek berdasar Peraturan Perundangan Jilid 1
BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

**Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas
Peraturan Pengadaan Barang & Jasa**

Update Paling Lengkap Himpunan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BERKEJARAN dengan waktu. Dalam masa yang tak menentu. Berikhtiar untuk mencari cara berkontribusi mengurangi dampak bencana tidak boleh mencapai jalan buntu. Tidak terpikir tadinya untuk menulis dan menyusun buku yang berisi tata regulasi, tata kelola dan tata laksana dalam rangka pengadaan barang/jasa penanganan keadaan darurat. Intensitas diskusi, konsultasi, kelas-kelas daring dan tebaran regulasi yang berserak menjadi pemicu untuk merangkai puzzle itu dalam satu rangkaian yang runtut. Selain itu ketika masa ini berlalu harus ada catatan yang selalu mengingatkan kita semua. Bahwa pernah kita melewati masamasa ini. Nanti kita cerita tentang hari ini, dengan rasa yang tidak hilang pergi untuk terlupakan. Banyak ketakutan kawan-kawan pelaku pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Apakah esok hari langkah darurat yang kita laksanakan hari ini akan dapat dipahami saat nanti semua ini berlalu dalam rasa dan permakluman yang sama. Ketakutan ini ditengarai menjadi penghambat utama percepatan tersedianya pasokan alat medis yang sangat critical bagi kawan-kawan paramedis. Buku ini juga tidak khusus hanya tentang penanganan COVID-19. Namun lebih general menuliskan tata laksana pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat berdasarkan regulasi yang ada. Dalam tata penyampaian yang berbeda tanpa berupaya menghilangkan substansi aturan. Atas dasar hal itu, ditambah support, kalau tidak bisa disebut desakan, kawan-kawan pelaku pengadaan. Penulis beranikan sedikit menulis dan menyusun dari berbagai referensi ke dalam sebuah buku kecil ini. Buku ini, dengan ijin penggiat pengadaan Bapak Rahfan Mokoginta dan Bapak Dr. H. Fahrurrazi, M.Si, juga dilengkapi dengan tautan file-file lengkap berisi contoh format administratif pelaksanaan pengadaan barang/jasa penanganan darurat yang telah di wakafkan kepada publik. Semoga keberkahan dan kebaikan melimpah kepada beliau. Buku ini bukanlah buku teori akademis namun lebih kepada rangkaian pemikiran taktis regulatif. Paling tidak dapat memberi sedikit petunjuk dan pengetahuan bagi para pihak untuk memahami bagaimana proses pengadaan barang/ jasa penanganan keadaan darurat.

Buku ini membahas mengenai prinsip-prinsip Hukum Pengadaan, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Khusus, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Penegakan Hukum sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan makalah, artikel, dan bahan kajian terkait pengadaan barang dan jasa Dalam hukum perjanjian atau kontrak (contract of law) kita mengenal dua golongan kontrak berdasarkan aspek namanya, yaitu kontrak nominaat dan kontrak innominaat. Kontrak innominaat merupakan kontrak yang dikenal di dalam Hukum Perdata seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain-lain. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat secara praktik. Timbulnya kontrak innominaat tersebut karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Buku ini menyajikan secara teoretis kontrak surogasi; kontrak terapeutik; kajian sosio-yuridis perjanjian kredit; perjanjian baku; perjanjian kemitraan; perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara; dan kontrak pengadaan barang serta dilengkapi dengan berbagai dokumen aplikasi atau permohonan dan dokumen kontrak seperti aplikasi kredit dan aplikasi pengajuan permohonan pinjaman dalam perjanjian kemitraan serta dokumen kontrak pada perjanjian kredit, perjanjian kemitraan, dan perjanjian asu-ransi. Buku ini sangat bermanfaat menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa, dosen, dan para praktisi yang berkecimpung di dunia hukum.

MENGENAL LKPP 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa

SEBUAH SEJARAH KECIL

Pengadaan Barang/Jasa Melalui SWAKELOLA

PENGANTAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan kebutuhan berbagai barang dan jasa serta spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan di lingkungan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Secara hukum, buku ini menggambarkan kondisi yang telah terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Buku ini juga memberikan tinjauan secara teoretis dan praktis bagaimana proses terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta metode pencegahannya, sejak dari tahap perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri, penjelasan, penyerahan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, hingga pengumuman calon pemenang. Di samping itu, buku ini memuat contoh-contoh kasus dalam pengadaan barang dan jasa yang disertai analisis hukumnya. Buku ini sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan seperti pihak manajemen BUMN/BUMD serta aparat pemerintahan dan swasta yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa, praktisi hukum, akademisi dan peneliti, mahasiswa, serta masyarakat yang berminat dalam mempelajari pengadaan barang dan jasa dalam aspek hukumnya.

Dalam buku ini dibahas tentang perusahaan dan bentuk-bentuknya. Dalam pembahasan buku ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Cipta kerja. Bentuk-bentuk perusahaan yang dibahas dalam buku ini meliputi: 1.

Perusahaan perorangan (PO) 2. Persekutuan Perdata 3. Firma 4. CV 5. PT 6.

Usaha Bersama 7. BUMN 8. BUMD 9. BUM Desa 10. Koperasi 11. UMKM

Tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia dan pengelola terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara lengkap sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Namun, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi). Buku Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini ditulis oleh praktisi yang berpengalaman belasan tahun di bidang auditing dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembaca dituntun untuk memahami secara tepat, risiko yang mungkin dihadapi oleh praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembaca juga dikejutkan dengan berbagai potensi risiko pidana yang dapat terjadi. Buku yang ditulis dengan bahasa lugas ini dilengkapi ilustrasi dan contoh kasus, sehingga menjadi BACAAN WAJIB para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

masyarakat luas yang ingin berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tentu saja, dengan bekal pengetahuan yang matang dan luas, Anda siap dan piawai dalam menghindari risiko tindak pidana (korupsi) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ingin aman dari risiko pidana sebelum terjun langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Baca dulu buku ini! -VisiMedia-

HUKUM AGRARIA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA Kata Pengantar Erman Rajagukguk Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang menggantikan Agrarische Wet 1870 telah berusia setengah abad. Situasi dan kondisi ketika Undang-Undang Pokok Agraria itu dilahirkan berlainan dengan keadaan sekarang. Jumlah penduduk Indonesia yang pada waktu itu baru sekitar 60 juta jiwa sekarang telah menjadi 220 juta jiwa, sementara tanah tidak bertambah luasnya. Ekonomi Indonesia pada tahun 1960-an masih berdasarkan pertanian, sekarang telah masuk ke dalam era industrialisasi. Perubahan-perubahan ini telah menyebabkan tekanan kepada tanah bertambah berat. Kebutuhan akan tanah untuk perumahan, prasarana, dan industri telah mendesak tanah pertanian dan hutan. Indonesia lima puluh tahun yang lalu belum berhadapan langsung dengan masalah ekologi dan lingkungan hidup akibat rusaknya hutan. Kini hal itu telah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia, di samping besarnya pengangguran. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan sekarang ini mencapai lebih kurang 11 juta jiwa. Pengangguran yang menimbulkan kemiskinan total dan perlunya ketahanan pangan, menyebabkan sektor pertanian tetap dianggap penting. Karangan-karangan dalam buku ini menunjukkan betapa peliknya masalah agraria yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Sudah tiba waktunya untuk mengubah Undang-Undang Pokok Agraria secara total dalam bayang-bayang industrialisasi, namun pertanian masih tetap penting. Desentralisasi dan demokrasi yang sedang mencari bentuk, merupakan faktor lainnya yang menjadikan buku ini penting untuk dibaca dan dijadikan bahan memperbaiki Peraturan Perundang-undangan Agraria Indonesia yang kita harapkan dapat dimulai dalam waktu dekat ini. Leiden, 27 Maret 2010 Erman Rajagukguk Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Samsul Ramli Edisi Bundling

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

“ Senang bisa bekerja sama dengan Dr. Achmad Sujudi selama di pemerintahan. Dia bisa mengikuti irama kerja saya yang taktis dan langsung pada sasaran. Sangat concern pada kesehatan dan kemanusiaan. Semoga pengalaman yang dituangkan dalam buku ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi generasi saat ini dan masa depan. ” H.M. Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) “ Sebuah fakta yang orisinal dan personal diungkapkan oleh penulis tentang

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

pengalaman diri dan yang ada di sekitarnya, tentang perjuangan kemerdekaan RI hingga pembangunan kesehatan. Benar-benar cocok dengan judulnya, ' Sejarah Kecil '. Saya mengenal penulis sebagai sesama aktivis '66, aktivis mahasiswa dan HMI di Universitas Indonesia yang gigih memperjuangkan tatanan bangsa menuju keadaan yang lebih baik. Buku ini menjadi bacaan yang penting dan berguna, khususnya bagi mereka yang aktif di pemerintahan, aktivis, dan generasi muda. " DR. Ir. Akbar Tandjung (Mantan Ketua DPR RI) " Buku memoar Dr. Achmad Sujudi ini bercerita bukan melulu tentang dirinya, tetapi juga tentang keadaan di sekitarnya---yang dialami, yang dilihat dan didengarnya---baik sebagai aktivis mahasiswa, sebagai dokter, sebagai birokrat kesehatan, maupun sebagai menteri di bawah dua Presiden. Dengan demikian, memoar ini bisa dipastikan kelak akan menjadi salah satu sumber penting bagi penulisan sejarah politik dan sosial Indonesia. Sebagai bacaan, buku ini enak dibaca karena soal yang dibicarakannya dibahas dengan saksama dan dengan bahasa yang lancar dan jernih. " Prof. Dr. Salim Said, MA, MAIA (Guru Besar Ilmu Politik) Buku ini sederhana dan gamblang. Penulis benar-benar mampu mewujudkan apa yang menjadi judul dari buku ini. Buku ini dapat menjadi referensi yang tepat bagi setiap pihak yang ingin mengetahui dan memahami gambaran umum tentang peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. M. Iskandarsyah (Subdirektorat Program Pelatihan LKPP) Konten dan konteks apik tertata. Semoga buku ini bisa memberikan gambaran utuh pengadaan barang/jasa pemerintah dengan lebih gamblang dan membumikan Perpres 54/2010 di alam nyata. Atas Yuda Kandita (Dewan Pendiri Pusat P3I) Buku ini sistematis, runut, filosofis, dan dikemas dengan kalimat yang mudah dipahami. Sangat aplikatif dan contoh soalnya sangat membantu pemahaman mengenai pengadaan barang/jasa. Semacam GRE (graduate record examinations) atau GMAT-nya untuk pengadaan barang/jasa. I suggest you to refresh your procurement memory with this book. Sinta Posmaria, S.T., M.T. (Asisten Pengawas SNVT P2JN Provinsi Jambi, Kementerian PU dan Wakil Ketua III DPD IAPI Jambi) Membaca buku ini memudahkan belajar mandiri dan dapat memahami konsep-konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah secara logis dan terstruktur. M. Kahar A Palinrungi (Ketua LPSE Universitas Negeri Makassar dan Trainer PBJ/SPSE) Bahasa dan gaya tulisan yang ringan dan mudah dipahami membuat saya yang baru pertama kali mendalami pengadaan barang/jasa dapat menyerap materi dengan baik. Buku ini sangat layak dan perlu sebagai pegangan para pihak yang terlibat pengadaan barang/jasa pemerintah. Drs. H. Abdul Razak, M.A.P. (Kepala Bagian Pembangunan Setda. Banjar dan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Banjar) -VisiMedia-

Referensi tentang aspek hukum pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting bagi para birokrat pemerintahan dan pengelola pemerintahan daerah, sebagai panduan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Juga menjadi referensi penting bagi para akademi (dosen/pengajar) dan mahasiswa studi Ilmu Hukum pada umumnya. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Masih adakah hal yang ingin Anda wujudkan dalam hidup ini? Apakah Anda ingin membuat hidup Anda jauh lebih bermakna, baik bagi diri sendiri maupun sesama? Jika jawabannya "Ya", buku ini akan menjadi teman seperjuangan Anda untuk menciptakan hari esok yang lebih baik. Buku ini akan membantu Anda memahami arti kesuksesan sejati, mengenali dan mengembangkan potensi diri Anda, menumbuhkan sikap pemenang, mengatasi keterbatasan diri, dan memaknai kegagalan secara bijak. Buku ini juga membantu Anda menyelami nilai-nilai spiritual universal dalam perjalanan sukses. Ditulis dengan bahasa sederhana, disertai berbagai kisah nyata dan kiat-kiat praktis, buku ini akan menghadirkan sejumlah inspirasi penuh makna

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

dan meningkatkan motivasi dalam hidup Anda.

Pengadaan Kekinian, Pengadaan Berbasis Lingkungan

Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia Pengaturan Serta Prosedur Dan Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

PRINSIP DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGGALIAN PENDAPATAN

Update Paling Lengkap Himpunan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kebijakan Baru Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kehidupan bernegara, dan menyadari kenyataan dalam praktik menunjukkan pema ha man Hukum Administrasi yang relatif masih sangat kurang dikuasai dan bahkan adanya pemahaman yang keliru, dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi selama ini masih dalam aspek hukum pidana, dan kurang memperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Mengingat pentingnya Hukum Administrasi dimaksud, buku referensi dalam bidang ilmu Hukum ini menyajikan dan membahasnya dari berbagai perspektif—pendekatan Ilmu Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (tindak pidana korupsi); sebagai bagian dari totalitas penjelajahan ide dan konsep yang telah berlangsung dalam praktik hukum. Tentunya banyak masalah dapat diatasi dan banyak hal dapat diungkapkan secara benar melalui metode pengkajian ini. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

Penyusunan buku ini didorong oleh adanya kebutuhan dari berbagai perguruan tinggi yang membina program studi ilmu kesehatan, dan para manajer rumah sakit serta para praktisi pencinta manajemen rumah sakit dan Puskesmas, karena sementara ini literatur manajemen pelayanan rumah sakit dan Puskesmas di pasaran masih relatif terbatas.

Bundling Buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Samsul Ramli yang di terbitkan oleh VisiMedia Pustaka terdiri dari: 1) Bacaan Wajib Para Prkatisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2) Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 3) Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 4) Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah AuthorPackage

Buku ini dipersembahkan untuk pengayaan materi pada Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dan sebagai acuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta khususnya. Selain itu, buku ini dapat menambah wawasan tentang pengadaan barang dan jasa berorientasi yang ramah lingkungan dan hijau (Green Public Procurement). Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dalam rangka melindungi lingkungan untuk generasi penerus Indonesia nantinya. Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua sehingga perlu dibuat acuan yang dapat digunakan dalam proses dan penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan. Hal ini penting dan menjadi pusat konsentrasi kita karena pengadaan barang/ jasa berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dalam rangka menjalani roda pemerintahan dan juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat tersebut juga harus memperhatikan keterkaitannya dengan kerusakan hutan dan kerusakan sumber daya alam lainnya sehingga pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan harus mulai diterapkan selangkah demi selangkah sehingga dapat melindungi kerusakan lingkungan lebih intensif. Secara tidak langsung juga kita melindungi dan memperpanjang kehidupan generasi penerus kita di masa yang akan datang. Penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan dan proses produksi barang-barang secara hijau di dunia telah menjadi trend beberapa tahun terakhir ini. Meskipun Indonesia terlambat dalam penerapan industri hijau tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Penyusunan regulasi-regulasi dan pedoman-pedoman perlu dilakukan untuk percepatan penerapan pengdaan barang dan jasa secra ber kelanjutan. Setidaknya Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam hal penerapan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan. Perlu komitmen yang jelas dan tegas dari semua stakeholder dan pelaku pengadaan barang dan jasa untuk keberhasilan dalam penerapan pengadaan

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

barang/ jasa berkelanjutan yang dilakukan melalui metode pemilihan e-Purchasing atau tender cepat dan adanya peraturan pelaksanaan teknis sebagai pedoman para pelaku pengadaan serta pembentukan tim monitoring dan pengendalian pengadaan barang/ jasa berkelanjutan

Modul Pengantar Barjas

Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Tips dan Inspirasi dalam Penerapan Pengadaan Berkelanjutan

MENGENAL LKPP 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PENULIS: A.

PRASETYA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7570-82-0 Terbit : Maret

2020 www.guepedia.com Sinopsis: Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di

Desa, merupakan aturan khusus yang diberlakukan bagi desa dalam

melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai yang telah

direncanakan di APBDesa. Buku Mengenal LKPP 12 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ini hadir

untuk mengajak pembaca belajar bersama tentang pengadaan barang dan

jasa di desa. Dalam buku ini dibahas runtut dari mulai kebijakan yang ada

di batang tubuh LKPP No. 12 Tahun 2019, tahapan perencanaan, persiapan

dan pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan

pengadaan serta contoh form-form yang dapat digunakan sebagai referensi

kita dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di desa.

www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508

Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Analysis, description, theory on business competition and problem based

on business law and regulation, including some cases in Indonesia.

Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 ini bukan sesuatu yang mudah, karena

erat kaitannya dengan dunia usaha dan perekonomian terutama dalam

menyamakan pandangan tentang penafsiran dari beberapa pengertian

seperti pengertian monopoli atau yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengertian

persekongkolan, jual rugi, posisi dominan, dan lain-lain. Demikian pula

dengan pengertian perumusan tentang struktur pasar, serta lingkup

geografis apakah cukup lokal atau regional atau harus bersifat nasional.

Apakah bahasa hukum yang digunakan di dalam peraturan tersebut sudah

cukup jelas dan benar, sehingga terjamin adanya persamaan pengertian

dengan segala implikasi operasionalnya. Kejelasan ini penting, jangan

sampai ruang gerak pelaksanaan hukum dibatasi oleh berbagai kesulitan

dalam membuktikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang maupun

oleh penafsiran yang berbeda-beda dan berubah-ubah, karena

ketidakjelasan peraturan. Harus diakui bahwa undang-undang memang

belum secara lengkap mampu memberikan solusi bagi penyelesaian

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, khususnya yang berkaitan dengan peran lembaga peradilan. Namun bagi pelaksana hukum, penerapan suatu undang-undang harus jelas atau sesuai dengan jiwa dan maksud yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Buku ini penulis susun secara sederhana dengan kalimat-kalimat yang bersahaja, dengan maksud agar dipahami dan mudah dimengerti oleh pembacanya atau mereka yang memerlukan, para akademisi, parapraktisi hukum seperti para pengacara, rekan-rekan penulis, yaitu hakim-hakim di seluruh Indonesia, yang menekuni bidang hukum persaingan usaha, dan yang terpenting bagi para pelaku bisnis dan masyarakat luas, untuk lebih memahami dalam mengimplementasikan Undang-Undang Persaingan Usaha ini. Buku Persembahkan Penerbit PrenadaMedia

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 22 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik "Posisi dan Teori Dasarnya" yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata "sektor" menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.

Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ASPEK HUKUM JASA KONSTRUKSI (Berdasarkan UU No 2 Tahun 2017

Tentang Jasa Konstruksi, PP No 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi, dan sudah disesuaikan dengan perubahan yang ada pada UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Perusahaan saling mematikan & bersekongkol

Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

Buku ini dipersembahkan untuk pengayaan materi pada Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dan sebagai acuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara Swakelola khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, buku ini dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Peningkatan kolaborasi Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Buku ini sebagai pelengkap peraturan dan pedoman yang sudah ada. Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara swakelola yang sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada, maka akuntabilitas dan performance pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan prinsip good governance. Terima kasih kepada Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr.Ir. Benyamin Bukit yang telah berkenan membimbing dan memberi saran/masukan dalam penulisan buku, dan Bapak DR. Sopan Adrianto, S.E.,M.M.,M.Pd. yang telah membantu dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan buku ini hingga diterbitkannya buku ini juga kepada Bapak Ir. Agus P. Jendro, M.Sc. selaku koordinator Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah memotivasi untuk menulis buku.

Buku Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini disusun sebagai panduan bagi masyarakat yang berkaitan dengan urusan pengadaan barang dan jasa sehingga mengetahui aturan, tata cara dan lain sebagainya. Buku ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Di dalam buku ini juga dilengkapi dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015.

Setelah membaca buku ini, saya seperti mendapatkan vitamin dan darah segar dalam menjalankan profesi saya sebagai advokat. Buku ini sangat bermanfaat, baik bagi pelaku usaha penyedia barang/jasa konstruksi, konsultan perencana/pengawas, pengguna jasa, terutama bagi para advokat yang ingin menggeluti bidang hukum pengadaan barang/jasa (Andreas Wibisono, S.H., Konsultan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Persaingan Usaha Managing Partner Law Firm Andreas Wibisono, S.H. & Co.); Buku ini merupakan cerminan pengkajian pengadaan yang ditulis dengan rangkaian bahasa yang mudah dipahami oleh setiap orang termasuk yang awam dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untaian makna setiap pasal pengadaan dapat terlihat dengan jelas dan tegas, bahkan tanpa mengikuti proses penyusunan aturan pengadaan, kita seakan melihat “asbabul pasal” atau sebab-sebab turunnya pasal pengadaan dalam buku ini (Khalid Mustafa, Ketua Umum P3I) -VisiMedia-

Salah satu peningkatan pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa adalah dengan ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan

Where To Download Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang Jasa

berkualitas. Sementara itu, untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas, setiap penyedia barang/jasa harus paham betul peraturan dan teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Oleh sebab itulah, buku panduan ini hadir di hadapan Anda. Buku ini mencakup berbagai aturan pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010, yaitu mulai dari penggunaan anggaran, pakta integritas, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, industri kreatif, aturan tentang sistem swakelola, kontrak pengadaan, pelelangan, dan lain-lain. Buku ini juga dilengkapi dengan teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga memudahkan Anda untuk memahami aturan tersebut dan membantu pemerintah dalam menciptakan pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka, dan kompetitif. Jadi, tunggu apalagi, segera miliki buku ini dan jadilah penyedia barang dan jasa yang terbaik. Selamat membaca!

Selling Point •
PP RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • PP
RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • PP No. 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 • Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Edisi Kedua)

Manajemen Aset dan Pengadaan

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi

HUKUM AGRARIA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Reach Your Max Potential